



KETUA DPD BERI USULAN Capres Independen Perlu Diwacanakan



KR-Antara/HO-DPD
Sultan B Najamudin

JAKARTA (KR) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai wacana dan kajian pengusulan bakal calon presiden (capres) melalui jalur independen atau non-partisan dalam sistem politik Indonesia penting diwacanakan oleh pembentuk undang-undang dan para akademisi hukum tata negara.

Hal itu disampaikannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), Kamis (2/1) lalu. “Kami sangat mengapresiasi langkah MK yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri men-

jadi pemimpin nasional,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (5/1).

Meski demikian, ia menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui partai politik. “Saat ini UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden, namun wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non-partisan perlu dimulai,” tuturnya.

Ia berharap agar hak untuk memilih maupun dipilih dapat dibuka lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat, sehingga bangsa Indonesia dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

“Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak parpol belum sepenuhnya bersedia mempraktekkan demokratisasi di internal partai,” ujarnya.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Analisis Stunting Moral Bangsa



Prof Anas Hidayat PhD

MASIH hangat di benak kita, menjelang pergantian kekuasaan pada 20 Oktober 2024, isu moral mencuat, seperti polemik seputar penggunaan jet pribadi oleh keluarga wakil presiden terpilih. Begitulah dunia maya Indonesia, para netizen-nya semakin berani menyoal persoalan moralitas yang menyangkut kepentingan publik. Mungkin menjadi sinyal bagi para pejabat publik untuk lebih hati-hati dan jauh dari arogansi kekuasaan.

Problem moral ini sebenarnya menembus ke banyak sektor aktifitas publik, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang jabatan publik, kekerasan di dunia Pendidikan, dan sebagainya. Persoalan moral di ruang publik ini bukan cukup di atas saja, tetapi juga merambah ke banyak sektor.

Barangkali yang selalu hangat diperbincangkan adalah di sektor politik, terutama isu tentang dinasti politik. Terakhir, paling menohok ulu hati dunia Pendidikan Indonesia adalah

*** Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:47	15:13	18:04	19:19	04:04
Senin, 6 Januari 2025	Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY				

PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN Pengadilan Tolak Keberatan Presiden Yoon

SEOUL (KR) - Pengadilan di Seoul, Minggu (5/1), menolak permohonan penangguhan yang diajukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol yang berupaya membatalkan surat perintah penahanan dan penggeledahan kediaman presiden, kata pejabat pengadilan. Pengadilan Distrik Barat Seoul membuat keputusan tersebut beberapa hari setelah tim pembela hukum Yoon mengajukan keberatan untuk menangguhkan pemberlakuan surat perintah yang mereka anggap ilegal.

Tidak ada rincian langsung tentang alasan penolakan dari pengadilan. Tim hukum Yoon mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. “Kami akan mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Penolakan ini tidak berarti bahwa surat perintah tersebut sah secara hukum,” kata Yun Gap-geun, pengacara Yoon.

Pengadilan yang sama sebelumnya menyetujui surat perintah penahanan Yoon untuk diinterogasi terkait perannya dalam upaya darurat militer yang gagal pada 3 Desember. Pengadilan juga mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah kompleks kediaman presiden di pusat Seoul.

Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi yang menangani kasus darurat militer Yoon mencoba mengeksekusi surat perintah itu pada Jumat (3/1).

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Korlantas Berlakukan Sistem Poin

Tabrak Lari, SIM Dicabut

JAKARTA (KR) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengatakan, penerapan sistem pengurangan poin bagi pelanggar lalu lintas mulai berlaku pada tahun 2025 ini.

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, sistem poin itu bernama Traffic Activity Report dengan menggunakan sistem nilai kepatutan berkendara (merit point system).

“Ini nantinya akan menjadi data keselamatan terhadap perilaku masyarakat dalam berkendara atau berlalu lintas di jalan dengan parameternya adalah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas,” katanya dalam keterangan yang

diterima di Jakarta, Minggu (5/1).

Irjen Pol Aan menjelaskan, seorang pengendara yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mendapatkan 12 poin dalam setahun. Apabila melakukan pelanggaran ringan, akan dikurangi satu poin. Jika melakukan pelanggaran sedang, kata Kakorlantas, akan dikurangi tiga poin. Apabila melakukan pelanggaran berat, akan dikurangi lima poin.

“Apabila melakukan kecelakaan hingga

menyebabkan korban meninggal dunia, dikurangi 12 poin. Tabrak lari itu bisa langsung dicabut SIM-nya,” kata Kakorlantas Polri menjelaskan.

Jika poin habis dalam periode 1 tahun, lanjutnya, akan dilakukan penarikan atau pemblokiran terhadap SIM pengendara. “Nantinya pada saat perpanjangan, itu harus diulang. Kalau tadi yang tabrak lari, itu bisa dicabut, juga cabut permanen untuk SIM-nya,” katanya.

Poin tersebut, lanjut Aan, akan diintegrasikan dalam penerbitan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). “Kami akan memberikan catatan berapa kali SIM ini melakukan pelanggaran lalu lintas, berapa kali terlibat dalam kecelakaan lalu lintas,” terangnya.

Selain dari sisi poin, Korlantas juga akan memperketat pengawasan pengendara melalui Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). “Ini salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” pungkasnya. **(Ant/San)-f**

Sistem Poin Lalu Lintas

- Traffic Activity Report (Merit Point System) menjadi data keselamatan perilaku masyarakat dalam berkendara/berlalu lintas dalam setahun.
- Dalam setahun SIM memiliki nilai 12 poin.
- Pelanggaran ringan dikurangi 1 poin.
- Pelanggaran sedang dikurangi 3 poin.
- Pelanggaran berat dikurangi 5 poin.
- Kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dikurangi 12 poin.
- Tabrak lari langsung dicabut SIM-nya. Jika 12 poin habis, SIM diblokir. Saat perpanjangan harus mengulang.

Sumber: Kakorlantas Polri

Grafis: Arko



DI TOL CIPULARANG 5 Kendaraan Terlibat Laka Beruntun



KR-Antara/HO-Jasa Marga

Kondisi Tol Cipularang padat akibat peristiwa kecelakaan beruntun.

PURWAKARTA (KR) - Lima kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di KM 97+200 ruas Tol Cipularang atau Purba-leunyi arah Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/1) pagi.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional

Division Agni Mayvinna di Purwakarta, Jabar mengatakan, kecelakaan beruntun itu terjadi pukul 09.11 WIB. Kecelakaan melibatkan lima kendaraan yang terdiri satu truk, satu bus, satu angkutan travel, dan dua minibus atau kendaraan pribadi.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

EKSPONEN FUSI PPP 1973 BERSUARA Umumkan Sejumlah Calon Ketum PPP

JAKARTA (KR) - Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 yang terdiri sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Serikat Islam (SI) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), mengumumkan dukungan untuk sejumlah calon ketua umum PPP.

“Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan calon-calon ketum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun eksternal partai. Calon dari internal merupakan kader dari PPP,” kata Ketua Umum Parmusi Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu (5/1).

Husnan menyampaikan, calon yang diusulkan merupakan usulan tiap ormas, seperti NU yang mencalonkan mantan anggota DPR RI Habil Marati dan Wakil Gubernur Jateng terpilih pada Pilkada 2024 Taj Yasin.

“Calon dari Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia, Husnan B. Fanani, saya sendiri, anggota DPR RI 2009-2014 dan Duta Besar RI untuk Republik Azerbaijan 2016-2020 serta Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko,” ujarnya.

Selanjutnya, katanya, SI mengusulkan mantan anggota DPR RI Achmad Fariel. Selain itu, Perti mendukung mantan anggota DPR RI dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Anwar Sanusi.

Ia juga mengumumkan sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin,

*** Bersambung hal 7 kol 5**

MASIH DICARI TIM SAR GABUNGAN Seorang Nelayan Hilang di Pantai Congot

KULONPROGO (KR) - Tim SAR Gabungan masih melakukan penyisiran dan pencarian seorang nelayan yang hilang akibat kapal jungkung yang ditumpangi terbalik setelah terhantam ombak di Kawasan Pantai Congot, Temon, Kulonprogo Sabtu (4/1) siang. Sampai berita ini diturunkan korban laka kapal nelayan yang hilang atas nama Aan Anugrah Budi Setya warga Kledekan Lor, Jangkaran, Temon, kembali dilanjutkan setelah proses pencarian pascakejadian hingga sore hari belum membuahkan hasil.

Dalam lanjutan penyisiran dan pencarian korban,

tim terbagi dalam empat Search and Rescue Unit (SRU). SRU 1 melakukan pencarian visual darat dengan penyisiran dari lokasi

kejadian hingga TPI Bayeman dengan jarak sekitar 1,5 kilometer. SRU 2 melakukan pencarian visual darat dengan penyisiran

dari TPI Bayeman hingga jalan putus sekitar 1,5 km.

“Sedangkan SRU 3 melakukan pencarian visual darat dengan penyisiran

dari jalan putus hingga Labuhan sekitar 1,5 km. SRU 4 melakukan pencarian visual darat dengan penyisiran dari Labuhan sampai Pantai Glagah sekitar 1,5 km. Hingga kini korban masih belum berhasil ditemukan,” jelasnya.

*** Bersambung hal 7 kol 5**



KR-Istimewa

Tim SAR Gabungan melakukan penyisiran dan pencarian seorang nelayan yang hilang akibat kapal yang ditumpangi terbalik setelah terhantam ombak di Pantai Congot.

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● KAMIS 19 Desember 2024 saat kami di BRI Kartasura ada pria memakai kaos hitam bertulisan “Sesungguhnya kasih sayang tidaklah cukup kalau tidak diimbangi kasih uang”. (Aris Irianti, Senepo Timur 75 Kutoarjo 54212)-f